

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan kewenangan terhadap desa sebagai daerah yang otonom menjadikan desa memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa. Kewenangan yang termasuk dalam undang-undang tersebut salah satunya yakni kewenangan untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa guna peningkatan kesejahteraan dan peningkatan sektor usaha ekonomi masyarakat. Bentuk peningkatan sektor usaha ekonomi masyarakat di desa dapat ditempuh melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Kementerian Dalam Negeri mencatat pada tahun 2013 Indonesia memiliki 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.309 wilayah administrasi I kelurahan. Artinya, total wilayah administrasi setingkat desa dan kelurahan adalah sebanyak 81.253. Dari jumlah tersebut, masih terdapat 39 ribu desa tertinggal, kurang lebih 17 ribu desa sangat tertinggal, dan 1.100 desa yang ada di perbatasan minim sentuhan dan masih terabaikan (Sidik 2015). Dari hal tersebut, maka desa dapat berupa desa agraris, desa manufaktur, desa industri, bahkan desa nelayan. Keunikan kearifan lokal setiap desa merupakan bagian dari keragaman potensi di setiap perdesaan yang dapat dijadikan sebagai bagian dari penunjang dalam

pemberdayaan masyarakat dan sebagai cara dalam pelestarian budaya tradisional dari sebuah desa itu sendiri. Kearifan lokal juga disebut sebagai semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis (Keraf, 2010).

Dengan adanya kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat desa, maka akan menimbulkan keseimbangan kehidupan di desa itu sendiri. Menurut Wibowo (2011) bahwa fungsi dan makna kearifan lokal, yaitu: (a) berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, (b) berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia; (c) berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan (d) berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan. Dimana dari semua fungsi kearifan lokal tersebut dapat bermakna sosial, bermakna sosial ekonomi, bermakna etika dan moral bahkan bermakna politik, serta kearifan lokal tersebut dapat menjadi modal utama dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Kabupaten situbondo adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur, dengan pusat pemerintahan dan ibu kota kabupaten terletak di Kecamatan Situbondo. Kabupaten ini terletak di daerah pesisir utara Pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda dan dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung Baluran dan lokasi usaha perikanan. Dengan letaknya yang strategis, di tengah jalur transportasi darat Jawa-Bali, kegiatan perekonomiannya tampak aktif. Situbondo mempunyai pelabuhan Panarukan yang terkenal sebagai ujung timur dari Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan di Pulau Jawa yang dibangun oleh Daendels pada era kolonial Belanda. Angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo

mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga mencapai 5,07% disini terjadi peningkatan sebesar 0,07 point setelah di tahun 2016 hanya mencapai 5,00%. Angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo ini mulai membaik ditahun 2017 setelah sebelumnya pada tahun 2015 sempat mengalami perlambatan dengan persentase ekonomi yang hanya 4,86%. Hal itu diakibatkan karena dampak dari kondisi ekonomi global yang belum membaik yang dipicu oleh kenaikan BBM, kenaikan tarif dasar listrik, dan tingginya tingkat suku bunga Bank kebijakan pemerintah yang pada akhirnya menyebabkan situasi kurang kondusif bagi dunia usaha (Fauzi, A 2014).

Panarukan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 8 Km dari ibu kota Kabupaten Situbondo ke arah barat. Pusat pemerintahannya berada di Desa Wringin Anom. Nama Panarukan yang dahulu dieja *Panaroecan* dikenal terutama sebagai ujung timur jalan Raya Pos atau *Grote Postweg* yang dibangun Gubernur Jenderal Daendels, Gubernur Hindia Belanda kala itu. Adapun desa-desa yang termasuk dalam Kecamatan Panarukan diantaranya Desa Alas Malang, Desa Duwet, Desa Gelung, Desa Kilensari, Desa Paowan, Desa Pelleyan, Desa Sumber Kolak, Desa Wringin Anom.

Masyarakat pesisir yang identik dengan nelayan merupakan bagian dari masyarakat terpinggirkan yang masih terus bergulat dengan berbagai persoalan kehidupan, baik ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun budaya. Kondisi Kehidupan mereka selalu dalam kondisi yang memprihatinkan, terutama secara

ekonomi. Dengan penghasilan yang selalu tergantung pada kondisi alam (Winengan,2007).

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah terdiri dari lautan dan memiliki potensi kelautan cukup besar, dengan potensi yang dimiliki tersebut seharusnya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan (maritim) tersebut. Namun kenyataannya ,kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan sering di identikkan dengan kemiskinan. Tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih dibawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan social yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian.

Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan kearah darat batas administrasi kabupaten/kota. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas social ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Masyarakat pesisir

adalah sekumpulan masyarakat (nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, dan lain-lain) yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan salah satunya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga yang khusus didirikan untuk membantu meningkatkan pendapatan asli desa tersebut. BUMDes didirikan dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa. Tetapi kebanyakan BUMDes tidak berjalan sesuai tujuannya dan tidak jarang pula BUMDes yang macet atau berhenti di tengah jalan. Ada banyak faktor yang menjadi penghambat berjalannya BUMDes, antara lain (Purnamasari, Hanny.Dkk, 2016).

- a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.
- b. Pemerintah desa kurang maksimal dalam memberdayakan masyarakat untuk pengembangan BUMDes.
- c. Tidak berjalannya BUMDes.

Pada hakekatnya BUMDes didirikan dan dikelola dengan asas kebersamaan dan gotong royong yang diikuti dengan semangat kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 89 yang menyatakan, bahwa fungsi dari pendirian BUMDes yaitu (a) pengembangan usaha (b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sehingga dalam pelaksanaannya banyak desayang mendirikan BUMDes berorientasi pada pemberian dana berguna.

Di Kabupaten Situbondo tepatnya di Kecamatan Panarukan yang merupakan wilayah pesisir memiliki BUMDes di masing-masing desa yang rata-rata didirikan tahun 2017 sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Panarukan masih belum optimal yang dikarenakan ada beberapa faktor di antaranya : (proker masih tidak tersusun rapi, Kurang pahamnya masyarakat tentang BUMDes). Dengan pentingnya peran BUMDes dan kondisi di lapang yang masih belum optimal, maka diperlukan kajian lebih lanjut mengenai BUMDes di daerah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Maka berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo?
2. Seberapa besar pengaruh BUMDes terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo?
3. Kendala apa saja yang ada dalam upaya pelaksanaan BUMDes di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo?
4. Strategi apa saja yang digunakan untuk mengembangkan BUMDes di daerah pesisir di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh BUMDes terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo.
3. Untuk mengidentifikasi Kendala apa saja yang ada dalam upaya pelaksanaan BUMDes di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
4. Untuk mendeskripsikan strategi yang digunakan untuk mengembangkan BUMDes masyarakat pesisir di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi, atau masukan bagi semua pihak :

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan langkah awal dari penerapan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, dan pengalaman yang dapat dijadikan referensi.
2. Sebagai Bahan informasi bagi pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan BUMDes.
3. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi peneliti lain dalam penelitian sejenis.
4. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya ilmu sosial ekonomin pertanian.